

## ABSTRAK

### **Ajriel Akmal Hakika Dedeng : Advokasi Kebijakan Tentang Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Siri Di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang**

Pernikahan siri adalah nikah yang tidak tidak tercatat dalam dokumen resmi negara yang berakibat tidak memiliki legitimasi hukum. Perkawinan siri jika dipandang dari hukum pernikahan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Berdasar pada kasus yang berkembang, pernikahan siri dengan ternyata masih dijadikan alternatif oleh masyarakat Kecamatan Pagaden Barat untuk dapat membentuk sebuah keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengadvokasian kebijakan tentang pernikahan untuk mencegah praktik pernikahan siri, ketidaktercapaian suatu kriteria yang jelas dari pencegahan pernikahan siri, keterukuran dari tindakan pencegahan kasus pernikahan siri, keterbatasan upaya pencegahan pernikahan siri, serta fokus upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat .

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori advokasi kebijakan dari Scheneider, (2001) yang didalamnya menyampaikan bahwa Advokasi tidak akan lengkap jika : (1) Tidak tercapainya suatu kriteria yang jelas, (2) Terukur, (3) Terdapat Batasan, (4) Tindakan yang dilakukan memiliki arah yang jelas, (5) Memiliki fokus terhadap aktivitas yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yang berupaya untuk memahami keadaan dan kondisi dari suatu konteks dengan menggali lebih dalam situasi kehidupan nyata dan apa yang terjadi di sana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa advokasi kebijakan pernikahan dalam upaya pencegahan pernikahan siri yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Pagaden Barat sudah sesuai memenuhi kriteria yang ada yang dalam pelaksanaannya dibentuk dalam beberapa kegiatan antara lain: (1) Penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia; (2) Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk pernikahan siri; (3) Pendekatan majelis taklim untuk menjelaskan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif; (4) Membantu proses isbath nikah ke pengadilan agama.

**Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Pernikahan Siri, KUA Pagaden Barat**

## ABSTRACT

### **Ajriel Akmal Hakika Dedeng : Policy Advocacy Regarding Marriage in Efforts to Prevent Siri Marriage in West Pagaden District, Subang Regency**

Unregistered marriage is a marriage that is not recorded in official state documents, which results in having no legal legitimacy. Unregistered marriage when viewed from the law of marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, unregistered marriage is a form of marriage that is prohibited by marriage law. Based on the cases that developed, the community of West Pagaden District still used the siri-marriage to form a family.

This study aims to find out about advocating for policies on marriage to prevent the practice of unregistered marriages, the failure to achieve a clear criterion for preventing unregistered marriages, the measurability of preventive measures for unregistered marriage cases, the limitations of efforts to prevent unregistered marriages, and the focus of efforts to prevent unregistered marriages in West Pagaden District. .

The theory used in this study is the theory of policy advocacy from Schneider, (2001) which states that advocacy will not be complete if: (1) clear criteria are not met, (2) measurable, (3) there are limitations, (4) The actions taken have a clear direction, (5) Have a focus on the activities carried out.

This study uses a qualitative descriptive research method. A qualitative research approach that seeks to understand the circumstances and conditions of a context by digging deeper into real-life situations and what happened there. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Based on the results of the research, it can be concluded that advocacy on marriage policies in an effort to prevent unregistered marriages carried out by the Office of Religious Affairs in West Pagaden complied with the existing criteria which in its implementation was formed in several activities including: (1) Counseling on Marriage and Family Registration Happy; (2) Dissemination of the importance of registering marriages and the negative effects of unregistered marriages; (3) The taklim assembly's approach to explaining that there are more negative impacts from unregistered marriages than positive impacts; (4) Helping the marriage is bath process to the religious court.

**Keywords: Policy Advocacy, Unregistered marriage, West Pagaden Religious Affairs Office**